

Kebijakan desentralisasi fiskal dan tuntutan akuntabilitas yang tinggi terhadap birokrasi publik menghendaki peningkatan profesionalisme dalam manajemen publik di mana sistem penganggaran yang baik merupakan salah satu unsur yang demikian penting. Untuk itu penerapan teknik-teknik penganggaran yang konvensional dengan *line-item budgeting*, *zero-based budgeting* (ZBB) dan lain-lain dalam organisasi pemerintah kini tengah bergeser ke arah penganggaran yang lebih efisien, rasional dan sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Perangkat perundangan juga telah disiapkan untuk menyempurnakan sistem penganggaran publik, misalnya melalui UU No. 17 tahun 2003 serta peraturan-peraturan teknis lainnya.

Namun masalah teknis berkenaan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja mungkin masih belum dipahami benar oleh sebagian besar birokrat maupun masyarakat pada umumnya. Karena itu kehadiran buku ini terasa penting sebagai acuan awal. Bagian awal buku ini membahas tentang konsep-konsep anggaran pemerintah, fungsi anggaran serta ciri-ciri pokok anggaran kinerja yang membedakannya dari sistem penganggaran konvensional. Juga dibahas tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyusunan anggaran kinerja di daerah seperti Arah Kebijakan Umum (AKU), penentuan strategi dan prioritas anggaran dengan analisis anggaran kinerja yang didasarkan pada aspirasi masyarakat.

Selanjutnya bagian kedua membahas tentang kinerja (*performance*) sebagai tolok-ukur utama bagi sistem penganggaran kinerja. Pembahasan ini penting untuk memahami berbagai unsur teknis yang menyangkut anggaran kinerja baik menyangkut struktur anggaran, pembuatan program dan kegiatan (RASK dan DASK) serta tata-usaha anggaran yang menggunakan sistem akuntansi pemerintahan yang lebih modern. Masalah yang harus dihadapi oleh para pembuat keputusan mengenai anggaran terkadang bukan hanya menyangkut tolok-ukur dan indikator anggaran tetapi juga berbagai macam peraturan mengenai anggaran kinerja yang memang masih baru dan terkadang satu sama lain belum konsisten.

Siklus anggaran kinerja dalam buku ini juga disertai dengan penjelasan mengenai sistem legislasi APBD, mekanisme akuntabilitas dan pengawasan anggaran publik sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Akhirnya, buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh konkret dari penyusunan anggaran publik yang dilaksanakan di daerah serta pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab dalam rangka menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam satuan-satuan anggaran.

Buku ini cocok untuk dibaca oleh para anggota DPRD, pejabat Pemda, akademisi terutama yang menekuni bidang ekonomi, anggaran publik, administrasi keuangan daerah, serta para mahasiswa Fisipol jurusan administrasi negara, fakultas ekonomi dan fakultas hukum, para pegiat LSM serta masyarakat yang menaruh minat pada bidang penganggaran publik.